

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI ERA DIGITAL

Imma Latifa, Farid Pribadi

Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

e-mail: immalatifa.21057@mhs.unesa.ac.id, faridpribadi@unesa.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk memperkirakan capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan oleh pendidikan. Karena pendidikan akan membentuk pola pikir seseorang serta membantunya bertahan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis. Di era digital dan globalisasi yang semakin meluas saat ini, masyarakat memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alternatif pekerjaan. Meskipun demikian, peluang pekerjaan tersebut perlu dilatih dan diasah baik secara otodidak melalui buku, website, dan video maupun melalui kursus. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Kajian literatur menjadi dasar dalam membentuk konsep maupun teori baru. Data yang digunakan merupakan data sekunder berasal dari artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh jurnal internasional bereputasi seperti Scopus, Web of Science, Elsevier, dan lain-lain serta jurnal nasional terindeks Sinta (*Science and Technology Indeks*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperkenalkan masyarakat pada teknologi digital yang berpotensi menjadi peluang kerja. Sehingga masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: pendidikan nonformal, era digital, pengangguran

Abstract

Education is part of the Human Development Index (HDI) which is used to estimate development achievements in the qualities of human life. One of the quality of human resources is determined by education. Because education will shape a person's mindset and help him survive in a dynamic society. In the digital era and globalization that is increasingly widespread today, people have many opportunities to take advantage of advances in information and communication technology as an alternative job. However, these job opportunities need to be trained and honed both self-taught through books, websites, and videos as well as through courses. This research uses a literature study method. Literature studies are the basis for forming new concepts and theories. The data used are secondary data derived from scientific articles published by reputable international journals such as Scopus, Web of Science, Elsevier, and others) as well as national journals with the Sinta index (*Science and Technology Index*). The conclusion of this study is how to reduce unemployment by introducing people to digital technology that has the potential to become job opportunities. So that people become more familiar with the progress and development of information and communication technology.

Keywords : nonformal education, digital era, unemployment

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk memperkirakan capaian pembangunan kualitas hidup manusia.

Menurut (BPS, 2020), capaian IPM Indonesia adalah sebesar 71,94 persen. Angka ini meningkat 0,03 persen (bertambah 0,02 poin) dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2019. Pada

aspek pendidikan, di tahun 2020 anak-anak yang berumur tujuh tahun mempunyai harapan untuk bisa mengenyam pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir sebanding dengan lamanya waktu untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Diploma 1. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen yang mencapai angka 12,95 persen. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah penduduk berumur di atas 25 tahun juga meningkat 0,14 tahun, dari sebelumnya 8,34 di tahun 2019 menjadi 8,48 di tahun 2020. Kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan oleh pendidikan. Karena pendidikan akan membentuk pola pikir seseorang serta membantunya bertahan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menunjang penyelenggaraan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada Pasal 31 ayat 1-5 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, siswa dan orang tua memiliki banyak pilihan untuk menentukan lembaga pendidikan mana yang sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan potensi masing-masing siswa. Lembaga pendidikan terdiri dari beberapa kategori berdasarkan jenjang serta memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda.

Lembaga pendidikan di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori yaitu lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal. Lembaga pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Contohnya seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sebagainya. Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal serta berfungsi untuk mengganti maupun melengkapi pendidikan formal. Contoh pendidikan nonformal yaitu lembaga kursus, lembaga bimbingan belajar (bimbel), Taman Kanak-Kanak (TK), dan lain-lain. Sedangkan lembaga pendidikan informal merupakan pendidikan yang menekankan pada

pendidikan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Lembaga pendidikan nonformal pada saat ini semakin berkembang dengan jenis dan jumlahnya yang semakin bertambah. Lembaga pendidikan nonformal pada umumnya diselenggarakan oleh instansi swasta yang ingin berkontribusi dalam menyelesaikan problematika pendidikan di Indonesia. Fungsi pendidikan nonformal telah diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 26 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.) yaitu "...mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional". Lembaga pendidikan nonformal meliputi beragam kategori, antara lain yaitu pendidikan kesetaraan, pendidikan kepribadian, pendidikan anak usia dini pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan penunjang pendidikan formal, dan sebagainya. Karena artikel ini akan membahas keterkaitan antara pendidikan nonformal dengan pengangguran di era digital, maka fokus pembahasan adalah mengulas lembaga pendidikan formal dalam kategori keterampilan dan pelatihan kerja.

Lembaga pendidikan nonformal telah banyak berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Terutama bagi para lulusan SMA dan SMK, mahasiswa, maupun *fresh graduate* yang ingin mengembangkan keterampilannya pada bidang di luar jurusan yang dipilih. Memiliki beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja tentunya akan menjadi suatu nilai tambah bagi seorang *job seeker*. Keterampilan tersebut pastinya tidak bisa diperoleh secara instan, sehingga diperlukan latihan dan proses untuk mencapainya. Kualifikasi perusahaan dalam mencari karyawan pada saat ini semakin meningkat dan pesaing untuk mencari kerja pun tak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, banyak *job seeker* yang berlomba-lomba meningkatkan keterampilannya dengan mengikuti berbagai macam kursus untuk

memperoleh sertifikasi yang dapat menjadi *point plus* seseorang ketika melamar pekerjaan.

Pengangguran telah menjadi suatu masalah sosial yang tidak terhindarkan setiap tahunnya di Indonesia, bahkan diperparah dengan adanya pandemi virus Covid-19. Pandemi mengakibatkan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran karena keadaan ekonomi yang sedang lesu sehingga tidak mampu menggaji banyak karyawan. Pandemi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya dan persaingan mencari kerja semakin ketat karena minimnya lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, pada era digital dan globalisasi yang semakin meluas saat ini, masyarakat memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alternatif pekerjaan. Meskipun demikian, peluang pekerjaan tersebut perlu dilatih dan diasah baik secara otodidak melalui buku, website, dan video maupun melalui kursus. Informasi dan pelaksanaan mengenai pelatihan otodidak dan kursus tersebut dapat diperoleh dengan mudah di internet terutama sosial media. Kursus tidak hanya diadakan bagi orang-orang yang ingin mencari kerja dan ingin mengembangkan keterampilan. Namun juga tersedia kursus bagi orang-orang yang ingin berdagang atau menjadi pengusaha. Khususnya bagi para pengusaha pemula yang memiliki niat dan modal namun minim pengetahuan dalam hal strategi berwirausaha.

Kursus yang banyak diminati serta dibutuhkan di dunia kerja antara lain kursus bahasa asing, kursus komputer, kursus mengoperasikan aplikasi yang spesifik pada suatu bidang misalnya spss dan microsoft office, kursus digital marketing, kursus desain grafis, dan sebagainya. Selain kursus, dalam skala lokal terdapat suatu lembaga pendidikan nonformal yang berperan dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan potensi dirinya yaitu Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut dengan BLK. Berbeda dengan kursus yang mayoritas

membutuhkan banyak biaya, BLK pada umumnya dapat diikuti secara gratis. Karena BLK merupakan salah satu lembaga atau program pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literature review*). Penelitian ini menggunakan tinjauan integratif yang berfokus pada peninjauan secara kritis dan potensial untuk menyatukan sudut pandang dan wawasan dari berbagai bidang penelitian (Snyder, 2019). Data yang digunakan berasal dari data sekunder seperti artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Elsevier dan jurnal nasional terindeks Sinta (*Science and Technology Index*). Selain itu, data yang digunakan juga berasal dari buku berbahasa Indonesia serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiatno & Husna, n.d.). Analisis data meliputi tahap pengumpulan data, pengamatan dan review, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Hermanto et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang telah terjadi sejak lama dan secara berangsur angsur menurun jumlahnya dalam sepuluh tahun ini. Namun angka pengangguran kembali meningkat secara drastis dengan adanya pandemi Covid-19 yang belum juga usai sejak tahun lalu.

(Sukirno,1994) mendefinisikan pengangguran sebagai suatu kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan kerja namun mereka belum bisa memperoleh pekerjaan. Sedangkan menurut (Nanga, 2001) pengangguran merupakan suatu kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan secara aktif tidak dalam masa mencari pekerjaan.

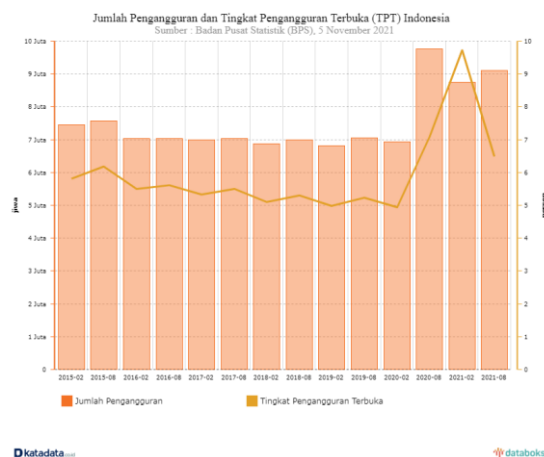
(Sukirno, 2000) mengklasifikasikan pengangguran menjadi tiga jenis sebagai berikut.

- a. Pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang disebabkan karena tindakan seorang pekerja yang memilih keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b. Pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang disebabkan karena terjadinya perubahan struktur atau sistem dalam perekonomian.
- c. Pengangguran konjungtur, merupakan pengangguran yang terjadi karena sifat alamiahnya.



Bagan 1 Grafik Data Pengangguran di Indonesia Dalam 10 tahun terakhir. Sumber : (Indonesia Tingkat Pengangguran, 2021)

Pada grafik data pengangguran di atas, dapat diketahui bahwa angka pengangguran di Indonesia terus menurun setiap tahunnya sejak 2010 hingga akhir 2019. Kemudian angka tersebut kembali meningkat secara pesat pada awal 2020.



Bagan 2 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia. Sumber : (Pengangguran Indonesia Kini Ada

9,1 Juta Orang, Turun Tipis Dari Tahun Lalu, 2021)

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 November 2021 merilis data jumlah pengangguran di Indonesia sejak bulan Agustus hingga November 2020. Sejumlah 21,32 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 menurun 7,8 juta orang dari bulan Agustus 2020 yang berjumlah 29,12 juta. BPS juga mencatat jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 sebanyak 2,56 juta pada bulan Agustus 2020 dan menurun sejumlah 740 orang menjadi 1,82 juta orang.

(Karunia, 2021), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fuziah mengungkapkan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran akibat pandemi Covid-19 yang meliputi enam langkah berikut.

1. Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebanyak 46,6 Miliar dollar AS, juga stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sebanyak 17,2 miliar dollar AS.
2. Mengadakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran kredit, dan secepatnya akan mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.
3. Pemberian bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang tergolong dalam kategori rentan dan miskin.
4. Pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja diprioritaskan kepada pekerja yang terkena PHK.
5. Memperbanyak dan memperluas program kesempatan kerja misalnya padat karya tunai, padat karya produktif, penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), kewirausahaan, dan sebagainya,
6. Menyediakan panduan bagi perusahaan dan pekerja khususnya perihal perlindungan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.

Dengan menurunnya angka pengangguran secara berangsur-berangsur berdasarkan data yang dicatat BPS, menunjukkan bahwa program pemerintah telah berhasil mengurangi pengangguran meskipun belum secara intensif. Jika dibandingkan, dana yang telah dikeluarkan pemerintah dengan data angka penurunan pengangguran, bisa dibilang hasil yang diharapkan kurang memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan program-program lainnya sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga perlu berkontribusi dalam mewujudkannya.

Pendidikan nonformal berperan penting dalam hal ini. Salah satunya yaitu pada poin 4 mengenai upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang diungkapkan Ida Fuziah, disebutkan tentang pelatihan kerja melalui program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah penyediaan layanan bimbingan pelatihan kerja yang dilakukan sepenuhnya secara online melalui aplikasi-aplikasi yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, pengguna Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif selama empat bulan sebesar Rp 1.000.000,00 perbulannya. Syarat bagi penerima insentif Kartu Prakerja sangat memprioritaskan masyarakat yang terdampak Covid-19. Salah satu syaratnya yaitu berusia 18 tahun dan sedang tidak berkuliah maupun bekerja. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mencari peluang pekerjaan dan mendapatkan penghasilan.

Kemajuan era digital ini benar-benar telah memberikan banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat. Namun hasil akhirnya tetap tergantung pada usaha masing-masing individu. Contoh pekerjaan yang sangat dibutuhkan di era digital ini antara lain *digital marketer*, *copy writer*, admin sosial media, fotografer katalog, desain grafis, editor video, dan sebagainya. Kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan tersebut tentunya tidak muncul secara alami dalam diri manusia, melainkan perlu diasah serta

dilatih untuk menjadi mahir dalam bidang tersebut.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menuntut masyarakat untuk selalu mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Khususnya bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Mereka harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan para *jobseeker* lainnya. Di era digital ini, pekerjaan di hampir semua bidang membutuhkan teknologi digital dan tentu saja tidak ketinggalan, orang-orang yang bisa mengoperasikannya. Misalnya di bidang pendidikan, Ujian Sekolah sudah banyak yang menggunakan komputer dan diperlukan server untuk menghubungkannya. Contoh lainnya yaitu perusahaan yang menggunakan software Microsoft Office, Google, dsb untuk menunjang kinerja karyawannya, buruh pabrik yang mengoperasikan mesin untuk alat produksi, dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan contoh dari teknologi digital.

Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital merupakan suatu alat atau perangkat yang tidak membutuhkan tenaga manusia secara manual dalam pengoperasionalnya melainkan menggunakan sistem yang canggih dan otomatis. Jika diibaratkan dengan komponen sistem komputer, manusia berperan sebagai *brainware* (pengguna) yang mengoperasikan software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras). Teknologi ini kemungkinan akan selalu berkembang serta semakin canggih untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun di sisi lain juga semakin meminimalisir penggunaan tenaga manusia. Banyak orang yang selalu khawatir bahwa dengan adanya teknologi digital, akan semakin mengurangi lapangan pekerjaan. Padahal, jika seseorang selalu mengikuti perkembangan inovasi teknologi, mereka akan bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Kemudian berpikir kreatif dengan mencari, mengembangkan, bahkan menciptakan alternatif pekerjaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi digital.

Semua pada akhirnya tergantung pada pola pikir masing-masing individu. Apakah ingin tetap bertahan dengan pola pikir lama, atau mengikuti perkembangan zaman dengan pola pikir yang lebih adaptif. Terlebih lagi adanya prediksi bahwa Indonesia akan mengalami suatu fenomena bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 dimana masyarakat yang termasuk angkatan kerja lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, pada saat ini banyak orang yang semakin gencar untuk mencoba peluang berwirausaha apalagi jika berhasil, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang disekitarnya. Keterampilan berwirausaha juga tidak didapat hanya dengan menggunakan naluri, melainkan bisa dengan mengikuti pelatihan atau kursus-kursus yang dapat mengasah kemampuan berwirausaha. Pelatihan dan kursus tersebut juga tidak hanya melatih keterampilan fisik, namun juga melatih kepribadian dan cara berpikir yang harus dimiliki wirausahawan.

Pelatihan dan kursus biasanya dilaksanakan secara offline maupun online. Namun karena adanya pandemi ini, kursus online lebih banyak diminati karena selain fleksibel dalam hal waktu dan tempat, banyak penawaran menarik yang diberikan oleh penyelenggara. Kursus secara online juga tidak hanya bisa berada pada tingkat lokal maupun nasional, tetapi juga tingkat internasional. Banyak kursus-kursus dari luar negeri yang bisa diikuti secara online baik berbayar maupun tanpa dipungut biaya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi mereka yang ingin mencoba suasana baru dengan berdiskusi bersama orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda. Selain itu, bagi orang yang sedang belajar bahasa Inggris, juga bisa meningkatkan kemampuannya saat mengikuti kursus tersebut.

Pada umumnya atau mayoritas orang mengikuti kursus dan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka yang tidak bisa dilakukan ketika menjalani pendidikan di lembaga pendidikan formal. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut

antara lain terbatasnya waktu karena telah ditentukan oleh kurikulum pendidikan, tidak adanya orang yang bisa melatih atau mengasah peserta didik pada bidang tertentu, serta sekolah yang hanya mengutamakan akademik dan mengesampingkan nonakademik, dan sebagainya. Dengan mengikuti pelatihan dan kursus, potensi yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kemampuan diri tidak akan terbuang dengan sia-sia.

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan salah satu bentuk dari lembaga pendidikan nonformal yang berdiri di bawah naungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pendirian LKP sebagai bagian dari pendidikan nonformal telah diatur dalam (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 2 Nomor 81 Tahun 2013, n.d.) "Satuan PNF dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum." LKP bebas didirikan oleh siapapun asal memenuhi syarat dan ketentuan perizinan pendirian LKP. Seseorang atau kelompok orang yang ingin mendirikan LKP harus memiliki keterampilan atau kemampuan khusus dalam suatu bidang yang ingin disalurkan kepada para peserta didik. LKP dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan oleh kemendikbud. LKP juga harus menyediakan alat penunjang atau sarana prasarana yang memadai dan layak untuk mendukung jalannya kursus.

Sama halnya dengan lembaga pendidikan formal, pada lembaga pendidikan nonformal juga terdapat sistem akreditasi yang menentukan bagaimana kualitas atau nilai dari suatu lembaga. Klasifikasi akreditasi lembaga kursus dan pelatihan merupakan kegiatan penilaian kelayakan akan suatu program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan (Amin, 2016). Akreditasi juga dilaksanakan atas dasar ketentuan yang sifatnya terbuka. Setelah proses pendirian, perizinan, dan pemenuhan ketentuan serta syarat, LKP tetap akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah daerah/lembaga yang berwenang. Pengawasan tersebut

dilakukan untuk meninjau bagaimana perkembangan LKP serta menentukan akreditasi dari suatu LKP. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 5, n.d.) telah menjabarkan tujuan penyelenggaraan LKP yaitu sebagai berikut.

“Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”

LKP yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam kerjsamanya dengan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Para pendiri LKP memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk menyalurkan atau mengajarkan kemampuan dan keterampilannya serta membantu masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dari keterampilan yang mereka miliki.

Sayangnya, banyak masyarakat Indonesia yang pada saat ini kurang mengapresiasi dan menyadari pentingnya manfaat LKP. Banyak dari mereka yang mampu untuk mengikuti kursus dan pelatihan namun justru merasa cukup hanya dengan memiliki satu atau dua keterampilan. Padahal di zaman modern yang peradabannya berkembang dengan pesat ini, terdapat banyak persaingan yang semakin ketat dalam kehidupan. Setidaknya, dengan memiliki lebih dari satu atau dua keterampilan bisa menjadi bekal atau cadangan untuk menghadapi persaingan di masa yang akan datang.

Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi Indonesia tentunya tidak bisa dihadapi tanpa persiapan yang matang dari pemerintah dan masyarakat. Untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang, diperlukan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan apa saja yang dirasa kurang maksimal dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga upaya untuk meningkatkan hal tersebut bisa segera

dilaksanakan. Selain itu, bagian yang paling utama dalam menghadapi bonus demografi adalah pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena masalah pengangguran juga erat kaitannya dengan kualitas SDM.

Analisis mengenai alasan mengapa seorang pengangguran menganggur perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem manakah yang salah atau perlu diperbaiki. Apakah mereka menganggur karena belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, atau karena minimnya lapangan pekerjaan, atautah hanya karena malas untuk mencari pekerjaan dan membiayai hidupnya sendiri. Apapun alasan personal individu tersebut, semuanya tetap kembali kepada pola pikirnya. Hidup haruslah selalu realistis. Tidak baik jika terlalu pilih-pilih tanpa mencobanya terlebih dahulu karena kita tidak akan tahu sebelum menjalaninya. Hidup terus berjalan sementara kebutuhan juga semakin bertambah. Jika tidak bekerja, bagaimana kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Pengangguran yang tidak berinisiatif untuk mengubah atau memperbaiki pola pikirnya hanya akan merugikan dirinya sendiri. Terlebih lagi pengangguran juga berpengaruh pada angka kemiskinan dan kriminalitas. Karena jika seseorang tidak memiliki kegiatan apapun untuk dilakukan, mereka akan cenderung melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Peningkatan kualitas SDM dapat dimulai dari bidang pendidikan terlebih dahulu. Peserta didik harus tau apa yang akan dilakukan setelah lulus dari sekolah. Pihak sekolah dan guru pun perlu mengarahkan peserta didik agar bisa menemukan potensi apa yang bisa dikembangkan dalam dirinya. Salah satunya yaitu dengan melakukan tes potensi diri dan tes kepribadian untuk mengenali minat dan bakat peserta didik. Dengan begitu, peserta didik bisa mengenali dirinya lebih awal dan bisa membuat keputusan untuk menekuni bidang mana yang sesuai dengannya. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter dan pola pikir peserta didik. Karakter dan

pola pikir terbentuk karena interaksi seseorang dengan lingkungannya. Sebelum pandemi, dengan adanya program *full day school* membuat waktu peserta didik lebih banyak dihabiskan di sekolah bersama guru-guru dan teman-temannya. Jika lingkungan sekolah tidak mendukung untuk membangun karakter dan pola pikir ke arah yang baik dan positif, maka hal tersebut bisa membuat peserta didik kesulitan untuk menghadapi tantangan setelah ia lulus sekolah.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Karena sistem pendidikan yang baik akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM. Sistem pendidikan di Indonesia juga sudah terlalu sering dikritik oleh masyarakat baik dari kalangan guru, siswa maupun orang tua. Kritik tersebut disebabkan oleh sistem pendidikan yang dianggap rumit, kurangnya sosialisasi, dan sebagainya. Sebagai penentu kebijakan, pemerintah harus selalu mengawasi dan mengevaluasi jalannya kebijakan. Dan ketika ingin mengubah atau memperbaiki kebijakan, perlu adanya pengamatan pada guru dan siswa sebagai pengguna kebijakan tersebut. Pemerintah pun tidak bisa terlalu ideologis dalam menyusun kebijakan, dan sebaliknya harus realistis menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik masyarakat.

Menurut ("Education Rankings by Country 2021," 2021), berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Amerika Serikat seperti US News dan World Report, BAV Group, dan Wharton School of the University of Pennsylvania, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke 54 dari 78 negara yang telah di survei. Angka ini naik satu tingkat dari tahun sebelumnya yang menempati peringkat 55. Perangkingan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang ingin menjalani *study abroad* atau kuliah di luar negeri. Selain itu, perangkingan juga bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi suatu negara mengenai kualitas sistem pendidikannya. Meskipun belum bisa

menyamai kualitas sistem pendidikan di negara maju, setidaknya negara-negara berkembang bisa mempelajari dan mempertimbangkan sistem pendidikan mana yang sekiranya sesuai untuk diterapkan di negaranya.

SIMPULAN DAN SARAN

Era digital merupakan era dimana tenaga manusia sedikit demi sedikit mulai tergantikan dengan mesin dan sistem komputer. Sisi positif perkembangan teknologi digital mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, sisi negatif dari teknologi digital adalah mengurangi kesempatan lapangan kerja karena perusahaan hanya membutuhkan sedikit tenaga manusia dan selebihnya akan dilakukan oleh mesin dan sistem komputer. Hal ini khususnya banyak terjadi di pabrik-pabrik. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pengangguran yang disebabkan oleh faktor tersebut, dibutuhkan suatu keterampilan lain yang bisa menjadi potensi atau peluang kesempatan kerja.

Disinilah pentingnya peran lembaga pendidikan nonformal khususnya lembaga pelatihan dan kursus. Sehingga daripada fokus pada sisi negatif dari era digital, lebih baik fokus pada mengubah atau memperbaiki mindset bahwa kemajuan peradaban memang tidak bisa dihindari dan harus diikuti arusnya jika tidak ingin tertinggal. Selain itu juga fokus pada perkembangan keterampilan diri agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang dinamis dan kompleks. Dengan pola pikir yang demikian, masalah pengangguran bisa sedikit demi sedikit berkurang dan tidak menjadi masalah sosial yang berkelanjutan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah salah satu cara untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan memperkenalkan masyarakat pada teknologi digital yang berpotensi menjadi peluang kerja. Sehingga masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Sistem pendidikan juga perlu diperbaiki untuk membangun pola pikir yang sesuai dan dibutuhkan di era digital ini. Selain itu,

pelatihan otodidak maupun melalui kursus diperlukan untuk mengembangkan keterampilan individu agar siap menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Saran penulis untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah harus selalu bekerja sama untuk mengadakan program-program sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Dan hal tersebut salah satunya bisa dimulai dengan terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pentingnya manfaat dari pendidikan nonformal terutama Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bisa menunjang potensi diri seseorang.

Dan bagi masyarakat yang mampu mendirikan LKP, diharapkan bisa selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas LKP agar bisa membantu orang-orang dengan potensi keterampilan tertentu memperoleh pekerjaan atau penghasilan dari keterampilan tersebut. Upaya mengatasi pengangguran tentunya tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu pihak, melainkan diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ketika membentuk suatu program untuk mengatasi pengangguran, pemerintah harus menyusun strategi agar masyarakat tertarik untuk mengikutinya. Sehingga program yang diadakan pun tidak menjadi sia-sia serta bisa mencapai target dari pembentukan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2016). *Optimasi Klasifikasi Penilaian Akreditasi Lembaga Kursus Menggunakan Metode K-NN Dan Naive Bayes*. 7(3), 148–154.
- BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2020 mencapai 71,94*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2020-mencapai-71-94.html>
- Education Rankings by Country 2021.

(2021). *World Population Review*. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>

- Hermanto, F. ., Sutirman, S., Hidayati, B., & Sholikhah, M. (n.d.). The need of practical teaching in vocational high school of Automation and Office Management Program. *J. Pendidik. Vokasi*, 9. <https://doi.org/10.21831/jpv.v9i3.26734>.

Indonesia Tingkat Pengangguran. (2021). <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/unemployment-rate>

- Karunia, A. M. (2021). 7 Langkah Pemerintah Tekan Jumlah Pengangguran Selama Pandemi. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2020/07/02/193200026/7-langkah-pemerintah-tekan-jumlah-pengangguran-selama-pandemi>

Nanga, M. (2001). *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada.

Pengangguran Indonesia Kini Ada 9,1 Juta Orang, Turun Tipis dari Tahun Lalu. (2021, November 5).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/05/pengangguran-indonesia-kini-ada-91-juta-orang-turun-tipis-dari-tahun-lalu>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2 Nomor 81 Tahun 2013.

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(August), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Sugiatno, S., & Husna, N. (n.d.). Isu-Isu Kosakata Matematis dalam Pembelajaran Matematika. J. Hasil Peneliti Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran, 6, 58. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i1.2281>.

Sukirno, S. (1994). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 26 ayat 5.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Pasal 26 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.